

PARADIGMA SISTEM KAPITALISME DAN ISLAM TENTANG *WELFARE STATE*

Muhammad Kambali
STAI Al-Azhar Menganti Gresik
e-mail: hambali236@gmail.com

Abstract: *Welfare state or better known as the term prosperous is a form of actualization of idealism that upholds the values of humanism. It contains a set of ideal ideas on how the state is able to serve its people. Capitalism as a modern economic system, which is first demonstrated by humans, built the concept of the welfare state on the philosophy of laissez faire, which manifested itself in a free market system that upholds the value of free faith liberalism. The state in the capitalist system has a famous role with the term minimal role which in the term Adam Smith is said to be no intervention. These roles include defense security, enforcement of justice and providing and maintaining certain public facilities and institutions. While the concept of welfare state in Islam is an effort to synergize worldly material interests with the spiritual interests of ukrowiyah. In addition, the concept of the welfare state in Islam is also based on the principles of Tawhid, al-Adl and khilafah. The role of the government in the Islamic conception includes fulfilling basic needs and guaranteeing the achievement of spiritual values. The fundamental difference between the two views of this system lies in the aspect of its philosophical foundation.*

Keywords: *Welfare State, Laissez Faire, Tauhid, al- 'Adl*

Pendahuluan

Welfare state atau yang lazim di sebut sebagai negara sejahtera merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, pada dasarnya keberadaan konsep *welfare state* tidak akan dapat kita pisahkan dari system politik-ekonomi yang berkembang yang dalam hal ini adalah sistem kapitalisme, sosialisme dan Islam.

Kapitalisme sebagai sistem ekonomi modern yang kali pertama diperagakan oleh umat manusia hadir dengan gagasan *welfare state* yang menjunjung kebebasan individu. Hal ini merupakan bentuk manifestasi atas teori *invisible hand* Adam Smith yang menghendaki akan minimnya peran serta negara dalam interaksi ekonomi. Teori tersebut pada dasarnya menyatakan jika setiap individu diberikan kebebasan untuk mengembangkan modal yang dimilikinya tanpa adanya campur tangan negara, maka ia akan mampu mewujudkan kesejahteraan di lingkungan sekitarnya.¹

Di sisi lain, sosialisme yang lahir dari pergulatan intelektual Karl Marx di Inggris, Prancis dan German, melihat kenyataan betapa sistem pasar bebas sebagai instrumen dalam perekonomian kapitalisme bukan mendatangkan kesejahteraan sebagaimana teori Adam Smith, melainkan melahirkan ketimpangan sosial yang tercermin dalam relasi hubungan

¹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 16-17.

produksi dengan tenaga produktif yakni munculnya eksploitasi dan alienasi. Dari sini, Karl Marx menyatakan kesejahteraan akan lahir manakala kepemilikan pribadi dihapuskan digantikan sistem kepemilikan bersama yang terwujud dalam sistem sosialisme-komunisme.²

Sementara itu, Islam menyatakan kesejahteraan akan lahir manakala terjadi sinergisitas antara kepentingan dunia dan akhirat. Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban pokok untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) dan menjamin tercapainya pelaksanaan nilai-nilai spiritual.³ Dari uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengungkap atau mendiskripsikan konsep *welfare state* dalam prespektif sistem kapitalisme dan Islam.

Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *liberary research* atau penelitian kepustakaan yang menitikberatkan pada pendalaman konsep dan teori. Sumber data primer penelitian ini bersumber dari buku yang membahas pemikiran tentang konsepsi kapitalisme yang dalam hal ini peneliti merujuk pada pokok-pokok pikiran Adam Smith sebagai tokoh sentral dan Islam yang merujuk pada pemikiran intelektual muslim ekonomi Islam yang terklasifikasi dalam Mazhab Maenstream dan Mazhab Iqtishoduna tentang *walfere state*. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis deskriptif.

Paradigma Kapitalisme

Gagasan *welfare state* dalam kapitalisme pada dasarnya bertumpu pada unsur kebebasan Individu yang merupakan manifestasi dari teori Adam Smith tentang *invisible hand*. Bagi Adam Smith, jika seseorang diberikan kebebasan untuk mengembangkan modal yang dimilikinya tanpa ada campur tangan dari negara, maka ia akan mampu membantu kesejahteraan di lingkungan sekitarnya.⁴ Sistem kebebasan tersebut pada akhirnya termanifestasi dalam sistem pasar bebas.

Negara dalam prespektif Adam Smith tidak diperkenankan masuk terlalu jauh dalam interaksi ekonomi. Dengan demikian, peran negara di sini hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu yang meliputi pertahanan keamanan, penegakan keadilan dan menyediakan dan memelihara sarana serta lembaga-lembaga publik tertentu.⁵ Peran negara tersebut dalam istilah Adam Smith dikatakan sebagai *no intervotion* atau peran minimal negara.

Secara khusus dalam bidang ekonomi negara dilarang ikut campur tangan, tanpa adanya alasan yang dibenarkan, sebab dengan masuknya negara dalam kepentingan ekonomi setiap individu tanpa adanya alasan yang tepat, negara dianggap melanggar kebebasan dan telah bertindak tidak adil. Menurut pandangan Adam Smith, setiap manusia mempunyai hak atas

² Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Keaperselisihan Revisionisme* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 98.

³ M. Umar Chapra, "Negara Sejahtera dalam Islam dan Peranannya di Bidang Ekonomi" dalam Ainur R. Shopian (ed), *Etika Ekonomi Politik* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 29-30 .

⁴ Suherman Rosydi. *Pengantar Teori Ekonomi*, 16-17.

⁵ Muhadi Sugiono, "Adam Smith dan Sistem Moral Kapitalisme:Tanggapan Atas Sony Keraf" dalam *Jurnal Prisma*, Vol. 2, Februari, 1996, 36.

kebebasan yang diperolehnya sebagai manusia dan tidak seorang pun termasuk negara untuk merampasnya kecuali dengan alasan yang sah, seperti alasan demi menegakkan keadilan.⁶

Tiga peranan negara tersebut merupakan peran fundamental yang digagas oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation*. Menurut dia, dengan peranan terbatas tersebut optimalisasi kesejahteraan individu pada lingkungan mikro dan negara pada lingkungan makro akan dapat tercapai. Dalam fungsi pertama adalah negara mempunyai fungsi untuk menegakkan keadilan. Fungsi ini diorientasikan untuk menjaga kebebasan tiap individu yang tertuang dalam sistem pasar bebas yang didaulat sebagai sistem sosial masyarakat modern. Dengan kata lain kelestarian sistem ini, dibatasi akan intervensi pemerintah ketika terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam interaksi pasar bebas.⁷

Selain itu, untuk optimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan keadilan, maka pemerintah harus juga bertindak adil. Dengan kata lain pemerintah tidak memihak kelompok manapun yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat:

1. Harus ada pemisahan dan kemerdekaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
2. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan. Pembatasan di sini adalah bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan.
3. Terdapat jaminan akan berlangsungnya kekuasaan oposisi. Artinya dalam rangka untuk mengontrol kebijakan pemerintah, dibutuhkan sebuah kekuasaan di luar pemerintahan untuk menjamin dan mengawasi bahwa pemerintah akan senantiasa bertindak adil.

Fungsi yang kedua yakni pertahanan keamanan. Fungsi ini dimaksudkan negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dari serangan dan ancaman dari bangsa dan negara lain. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah menyediakan sarana dan prasarana publik. Dalam hal ini pembangunan sarana infrastruktur baik berkenaan dengan sistem pasar bebas maupun berkenaan dengan sarana publik seperti jalan dan yang lainnya adalah menjadi kewajiban pemerintah.

Melalui tiga fungsi dasar pemerintah atau negara tersebut, Adam Smith sebagai *Funding Father* sistem kapitalisme meyakini bahwa kesejahteraan akan dapat mudah terealisasi dari pada peran pemerintah yang jauh lebih dominan namun cenderung distorsif. Oleh karena itu, dengan bimbingan *invisible hand* (tangan gaib), sistem pasar bebas akan mampu menjawab segenap permasalahan dan pertanyaan selama ini bagaimanakah cara untuk mendatangkan kesejahteraan.

Paradigma Islam

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal ini, selain sebagai ajaran

⁶ A. Sony keraf. "Keadilan, Pasar Bebas dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Ekonomi Adam Smith" dalam *Jurnal Prisma*, edisi 9, September 1995, 10.

⁷ Konsep keadilan yang digagas Adam Smith ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kelestarian sistem pasar bebas. Adam Smith menyadari bahwa kebebasan individu dalam interaksi ekonomi sebagaimana tertuang dalam teori *invisible hand* tidak sepenuhnya akan berjalan mulus sesuai mekanisme pasar. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kerugian antar individu dalam sistem pasar bebas, Adam Smith menggagas konsep keadilan komutatif yang menghendaki setiap individu untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan.

normatif, Islam juga berfungsi sebagai pandangan hidup (*world view*) bagi segenap para penganutnya. Dari hal ini, tentu saja Islam juga memiliki konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk merealisasikan kesejahteraan yang sinergis antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Salah satu konsep negara yang bersumber dari paradigma Islam adalah gagasan yang dikemukakan oleh al-Farabi tentang *al-madīnah al-faḍīlah* (negara utama). Poin pokok pemikiran al-Farabi tersebut antara lain *pertama*, motivasi atau dorongan alamiah manusia untuk berkelompok dan saling bekerjasama adalah dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan kesempurnaan hidupnya.

Kedua, kondisi dan proses pembentukan negara oleh manusia atau warga yang mempunyai rasionalitas, kesadaran, dan kemauan bulat untuk membentuk negara, di mana masyarakat sempurna yang terkecil (*kamīlah suhrā*) merupakan kesatuan dari masyarakat yang paling ideal untuk dijadikan negara. *Ketiga*, pentingnya seorang pemimpin negara utama dianalogikan seperti jantungnya tubuh manusia, dan kualitasnya mensyaratkan seorang yang paling unggul dan sempurna di antara warganya, yaitu kualitas seorang filsuf yang mempunyai pengetahuan yang luas dan memiliki keutamaan-keutamaan. *Keempat*, negara dibedakan berdasarkan prinsip-prinsip (*mahādi'*) dari para warga negaranya, yaitu prinsip yang benar (negara utama) dan prinsip yang salah (negara jahiliah, fasik dan lain-lain). Dan *kelima*, pemimpin membimbing warga negaranya untuk mencapai kebahagiaan (*al-sa'ādah*) sebagai tujuan negara.

Di samping itu, dalam bidang ekonomi negara mempunyai beberapa peranan yang antara lain:⁸

1. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
2. Meningkatkan stabilitas nilai riil uang.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.
5. Mengatur keamanan masyarakat serta membagi pemerataan pendapatan dan kekayaan.
6. Menyelaraskan hubungan internasional dan pertahanan nasional.

Analisis Kritis

Sistem ekonomi Islam sama sekali berbeda dari sistem-sistem yang berlaku. Ia memiliki akar dalam syariah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dengan sistem-sistem dunia yang berlaku saat ini, tujuan-tujuan Islam (*maqāsid shar'iyah*) adalah bukan semata-mata bersifat materi, tetapi didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.

Dalam ekonomi Islam terjadi penyuntikan dimensi iman dalam semua keputusan manusia tanpa memandang apakah keputusan-keputusan itu berkaitan dengan urusan rumah tangga, bidang usaha, ataupun pasar. Terintegrasikannya dimensi iman dalam setiap aktifitas

⁸ M. Umer Chapra, *Negara Sejahtera*, 35.

manusia akan merealisasikan efisiensi dan keadilan dalam hal alokasi dan distribusi sumber daya yang bertujuan mengurangi ketidakseimbangan dan ketidakstabilan perekonomian secara makro.

Pada dasarnya, prinsip dasar ekonomi Islam terdiri atas tiga hal, yaitu prinsip tauhid, khilafah dan *al-'adālah* (keadilan).⁹ Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi kerangka kerja bagi Islam (ekonomi), akan tetapi juga merupakan tujuan dan sumber utama *maqāṣid* dari syariah Islam.

Pertama, tauhid. Merupakan fondasi utama dalam Islam. Tauhid merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam yang menyatakan pada ke-Esaan dan ke-Mahaagungan kekuasaan Allah SWT. Dalam ranah ekonomi Islam, tauhid merupakan pengakuan manusia atas penciptaan alam seisinya oleh Allah SWT. Sehingga keberadaan alam beserta seisinya bukan terjadi secara kebetulan sebagaimana teori-teori dari sarjana barat yang mengkaji tentang asal-muasal alam semesta ini.¹⁰

Prinsip tauhid, juga mengajarkan pada manusia, bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia termasuk di dalamnya harta kekayaan adalah semata-mata berasal dari Allah SWT yang bersifat nisbi/relatif. Sedangkan yang abadi dan mutlak hanya milik Allah SWT saja. Dengan demikian, tauhid merupakan ruh/fondasi dari ekonomi Islam.

Kedua, khilafah. Dalam konsepsi ekonomi Islam, manusia merupakan *khalifah* Allah SWT di bumi. Manusia diutus Allah SWT ke bumi membawa misi menjadi seorang *khalifah* dalam arti sebagai wakil Allah SWT dan pemakmur bumi. Alam seisinya sebagai hasil ciptaan Tuhan semata-mata hanya untuk manusia guna dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat. Implikasi dari prinsip khilafah ini adalah:¹¹

1. Persaudaraan universal

Implikasi pertama dari prinsip khilafah ini adalah lahirnya persatuan dan persaudaraan antara umat manusia. Dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, maka pada dasarnya setiap individu adalah seorang khalifah juga. Oleh sebab itu, sikap saling menolong dan kerjasama senantiasa menjadi dasar setiap manusia dalam segala aktivitasnya, baik yang berkenaan dengan ekonomi maupun yang lainnya.

2. Sumber daya alam adalah amanat

Harta kekayaan yang didapat dari pengelolaan bumi dan isinya adalah semata-mata hanya titipan atau amanah dari Allah SWT. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan dan perdayagunaannya harus didasarkan prinsip kesejahteraan umat, kaidah halal-haram, dan tidak boros.

3. Gaya hidup sederhana

Islam menghendaki bahwa dalam penggunaan harta kekayaan, manusia hendaklah tidak bersikap boros dan sia-sia. Oleh sebab itu, gaya hidup (*life style*) yang diajarkan Islam adalah kesederhanaan.

Ketiga, *al-'adl* (keadilan). Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dikompromikan, artinya keadilan mempunyai urgensi yang teramat besar dalam kahidupan

⁹ M. Umer Capra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan (Surabaya: Risalah Gusti, 1998), 217.

¹⁰ Asal-muasal alam semesta dalam pandangan sarjana Barat sangat beraneka ragam, seperti Thales yang menyatakan pada dasarnya segala sesuatu itu berasal dari air, lain lagi dengan pandangan Heraklitos ataupun Phitagoras.

¹¹ M. Umer Chapra, *Islam*, 224-235.

manusia.¹² Manusia bisa hidup dalam kesusahan dan kelaparan, akan tetapi manusia tidak akan mampu bertahan hidup dalam ketidakadilan. Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan di sini adalah keadilan yang berarti kebebasan yang bersyarat islami. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasian dalam masyarakat. Jurang pemisah antara kaya dan miskin akan semakin tajam. Oleh sebab itu, nilai-nilai keadilan haruslah senantiasa menjadi landasan dalam setiap kegiatan ekonomi. Implikasi dari nilai-nilai keadilan ini adalah:

1. Kebebasan manusia

Islam memandang bahwa setiap manusia adalah dikaruniai oleh Allah SWT kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu juga ketika Rasulullah diutus ke bumi juga untuk membebaskan manusia. Oleh sebab itu, tindakan yang bertentangan dengan hakikat kebebasan manusia seperti perbudakan adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun demikian kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terbatas. Artinya, kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai etika dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya kaidah halal-haram.¹³

2. Perolehan penghasilan dari sumber-sumber yang baik

Islam mengajarkan untuk mencari harta kekayaan, namun cara dan sumber harta kekayaan tersebut haruslah sesuai dengan tuntunan syariah seperti berdagang yang terbebas dari riba.

3. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil

Harta kekayaan yang telah didapat haruslah didistribusikan secara merata pada masyarakat. Sebab, ketidakmerataan distribusi pendapatan akan merusak harmonisasi hubungan setiap manusia. Oleh sebab itu, Islam mensyariatkan zakat pada setiap manusia di samping sadaqah dan infaq.

4. Pertumbuhan dan stabilitas

Ketiga prinsip dasar di atas, yaitu tauhid, khilafah dan *al-'adl* adalah suatu kebulatan nilai yang integral yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga prinsip dasar tersebut terefleksikan dalam nilai-nilai universal yang melatarbelakangi keberadaan dan operasionalisasi ekonomi Islam.

Oleh karena itu, Islam tidak sejalan dengan kapitalisme yang merupakan sebuah sistem yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya. Di dalam ajaran Islam untuk menciptakan suatu keseimbangan antara sumber-sumber daya yang langka dan pemakaian-pemakaian atasnya dengan suatu cara yang dapat mewujudkan baik efiseinsi maupun keadilan adalah dengan memusatkan perhatian kepada manusia itu sendiri dan bukannya pada pasar atau negara.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat diperlukan suatu strategi. Strategi ini meliputi reorganisasi seluruh sistim ekonomi dengan empat unsur penting yang saling mendukung, yaitu:¹⁴

¹² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 109.

¹³ Mustafa Kamal (ed), *Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: UI-Press, 1997), 79.

¹⁴ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kotemporer*, Terj. Nur Hadi Ihsan (Surabaya: Risalah Gusti, 1998), 236

1. Suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat, yaitu moral dengan mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan khilafah dan *'adālah*.
2. Suatu sistem motivasi yang kuat untuk mendorong individu agar berbuat sebaikbaiknya bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat dengan dasar pertanggungjawaban kepada Tuhan.
3. Restrukturisasi seluruh ekonomi, dengan tujuan mewujudkan *maqāsid* meskipun sumber-sumber yang ada itu langka dengan dasar lingkungan sosial yang kondusif untuk menaati aturan-aturan pengamatan dengan tidak mengizinkan pemilikan materi dan konsumsi yang mencolok sebagai sumber pretise.
4. Suatu peran pemerintah yang berorientasi tujuan yang positif dan kuat.

Kesimpulan

Welfare state atau negara sejahtera merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai humanisme. Ia merupakan bentuk negara ideal yang dapat menyokong tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Paradigma kapitalis tentang *welfare state* yang mengandalkan peran individu yang berdasarkan atas kebebasan yang luar biasa hanya akan melahirkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, dalam pandangan ekonomi Islam konsep peran minimal negara bertentangan dan tidak dapat diterima, sebab hanya akan mendatangkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dari sini ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif bentuk negara yang ideal yang mengayomi dan menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan.

Daftar Rujukan

- Chapra, M. Umar. "Negara Sejahtera dalam Islam dan Peranannya di Bidang Ekonomi" dalam Ainur R. Shopian (ed). *Etika Ekonomi Politik*. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- _____. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terj. Nur Hadi Ihsan. Surabaya: Risalah Gusti, 1998.
- Keraf, A. Sony. "Keadilan, Pasar Bebas dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Ekonomi Adam Smith" dalam *Jurnal Prisma*. edisi 9, September 1995.
- Kamal, Mustafa (ed). *Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: UI-Press, 1997.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suseno, Franz Magnis. *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis Keaperselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sugiono, Muhadi. "Adam Smith dan Sistem Moral Kapitalisme: Tanggapan Atas Sony Keraf" dalam *Jurnal Prisma*. Vol. 2, Februari, 1996.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.